

RENCANA KERJA



KECAMATAN BUKI
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain. RENJA SKPD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Buki dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja SKPD ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bias memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada SKPD.

Dengan adanya dokumen ini diharapkan setiap prioritas program yang telah ditetapkan beserta targetnya dapat dijadikan acuan utama bagi pelaksanaan kinerja yang ada pada SKPD Kecamatan Buki, yang akhirnya mampu mewujudkan VISI dan MISI Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kami menyadari Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Buki masih banyak kekurangannya oleh karena itu kami mohon masukkan dari Stakeholder baik dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar maupun Dinas Instansi lainnya serta pihak swasta dan masyarakat guna meningkatkan efektivitas Perencanaan kegiatan yang strategis Kecamatan Buki dimasa yang akan datang.

Baruia, 2 Maret 2023

CAMAT BUKI



DEMPAK, S.Pd

Pangkat : Pembina

NIP. 19690921 199203 1 010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU.....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	21
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	22
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	34
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	38
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	38
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Buki.....	41
3.3 Program dan Kegiatan.....	41
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	50
BAB V PENUTUP.....	55

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

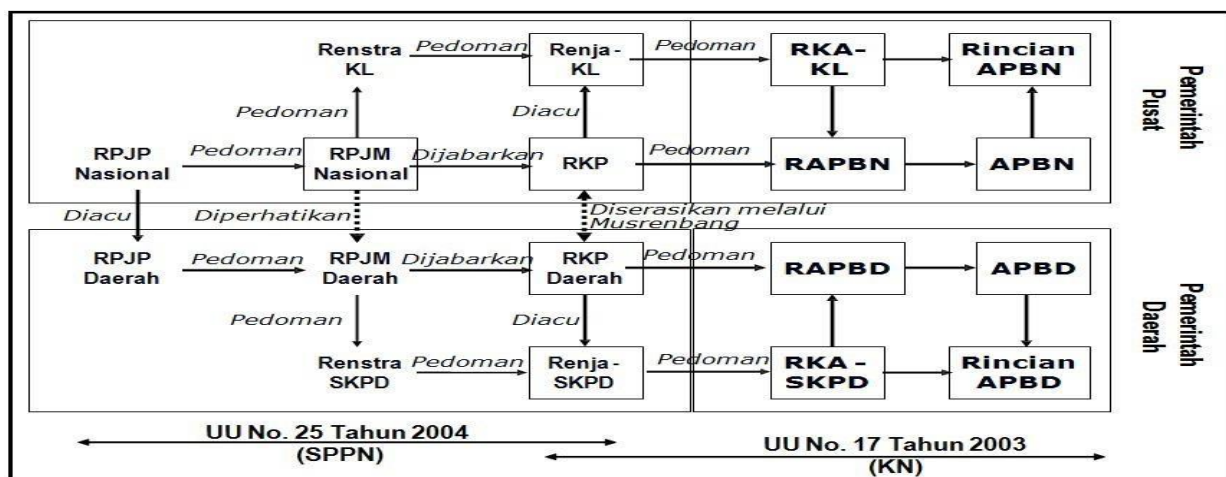
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Buki menyusun Renja Kecamatan Buki Tahun 2024 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Buki. Renja Kecamatan Buki Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Renstra Kecamatan Buki Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renja

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Buki tahun 2024 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perokonomian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4310); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perokonomian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah no 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312)

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 113);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Buki (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2007 Nomor 16);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005 – 2025 Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011 Nomor 3);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 05);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Buki (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 529, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 47)
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor)

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana kerja Kecamatan Buki Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk :

1. Menetapkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan periode Tahun 2024 yang mengacu visi, misi dan program Kabupaten Kepulauan Selayar guna mendorong partisipasi aparatur dan masyarakat di wilayah Kecamatan Buki;
2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Buki Tahun 2024;
3. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Renja Kecamatan Buki dengan RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Buki untuk memberikan arahan sekaligus pedoman bagi unit kerja dalam lingkup Kecamatan Buki dalam melaksanakan pembangunan guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai Rencana Strategis Kecamatan Buki Tahun 2021 – 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Buki Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika berikut :

Bab I Pendahuluan

Berisi Latar Belakang penyusunan Renja ini, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika pembahasan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Buki Tahun Lalu

Memuat : (1) kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Buki tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, (2) analisis kinerja pelayanan OPD, (3) isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, (4) review terhadap rancangan awal RKPD, dan (5) penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Buki, tujuan dan sasaran renja Kecamatan Buki,

Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan Rencana Kerja Kecamatan Buki terdiri dari Rencana Program, Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan serta indikator kinerja

Bab V Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta kaidah-kaidah pelaksanaan, dan Rencana tindak lanjut.

Bab II

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Buki Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Buki Tahun 2022 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Buki Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kecamatan Buki Tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Buki Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022.

Realisasi anggaran kecamatan Buki tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ;

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
			%	Rp
1	2	3	4	5
	KECAMATAN BUKI	1.706.883.700	97,66	1.666.873.919
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.589.122.900	97,70	1.552.577.119
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.500.000	88,89	4.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	700.000	100	700.000

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	900.000	66,67	600.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	900.000	100	900.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	700.000	71,43	500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	700.000	100	700.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	600.000	100	600.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.265.868.000	98,25	1.243.775.053
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.264.368.000	98,26	1.242.425.053
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	500.000	100	500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	500.000	70	350.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	500.000	100	500.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22.125.000	100	22.125.000
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.571.700	92,62	62.584.404
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.441.700	96,46	5.248.900
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.400.000	75	2.550.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58.730.000	93,28	54.785.504
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.100.000	100	40.100.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.100.000	100	40.100.000

1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143.961.200	96,32	138.668.662
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.585.000	57,95	7.292.862
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	131.376.200	100	131.375.800
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.122.000	94,53	63.449.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.662.000	95,77	60.009.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.460.000	77,13	3.440.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12.000.000	87	10.440.000
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.000.000	84	3.360.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.000.000	84	3.360.000
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	4.000.000	85	3.340.000
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.000.000	85	3.340.000
2.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.000.000	92	3.680.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	4.000.000	92	3.680.000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN	44.700.000	99,99	44.696.000

	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	44.700.000	99,99	44.696.000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.500.000	100	1.500.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	43.200.000	99,99	43.196.000
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.000.000	99,38	7.950.000
4.1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4.000.000	100	4.000.000
	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan Perundang - undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.000.000	100	4.000.000
4.2	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.000.000	98,75	3.950.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan	4.000.000	98,75	3.950.000
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	38.580.800	95,53	36.780.800
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	38.580.800	95,53	36.780.800

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	24.800.800	95,97	23.800.800
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7.000.000	88,57	6.200.000
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	6.780.000	100	6.780.000
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	14.480.000	99,65	14.430.000
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14.480.000	99,65	14.430.000
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1.500.000	96,67	1.450.000
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	10.000.000	100	10.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	2.980.000	100	2.980.000

Tabel T.C 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)
Kabupaten Kepulauan Selayar

SKPD : Kecamatan Buki

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)				(2)		(3)	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase capaian kinerja Kecamatan Buki	72,31 %	97,7%	63,03%	97,7%	155%	70,28%	97,7%	135%
						Persentase Capaian Kinerja Keuangan Kec. Buki	95,0%	97,2%	83%	97,66%	117%	85%	97,66	102%
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen kinerja perangkat daerah	100 %	99,29 %	100 %	88,89%	88%	100 %	88,89%	88%
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 laporan	100%
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 dokumen	100%
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 dokumen	100%
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 dokumen	100%
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, LPPD dan LKPJ.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1%	2 Dokumen	2 dokumen	100 %
7	01	01	2.02	Administarsi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Kec. Buki	100%	97,77 %	100%	98,25%	98%	100%	98,25%	98%
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang/12Bulan	15 orang/12 Bulan	17 Orang/12 Bulan	17 Orang/12Bulan	100%	17 Orang/12Bulan	17 orang/12 bulan	113%
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SPKD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 laporan	100%
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan/Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 laporan	100%

7	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Hasil Laporan Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 orang	1 orang	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan administrasi Umum Perkantoran	100%	99,68 %	100%	92,62%	92%	100%	92,62%	92%
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	50%
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan	4 dokumen	-	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 laporan	428 laporan	450 laporan	450 laporan	100%	450 laporan	450 laporan	90%
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	2 Unit	2 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	6 unit	300%
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran	100%	99,88 %	100%	96,32%	96%	100%	96,32%	96%

7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
7	01	01	2.08	04	Penyedia jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	94,53%	94%	100%	94,53%	94%
7	01	01	2.09	02	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan pajak dan Perizinannya	10 Unit	11 Unit	7 Unit	7 Unit	100%	7 Unit	7 unit	70%
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	2 unit	-	-	-	-	2 Unit	-	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dpelihara atau di rehabilitasi	8 Unit	4 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	6 unit	75%
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	8 Menit	30 Menit	25 Menit	25 Menit	100%	20 Menit	25 Menit	310%
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang dikoordinasikan	100%	100%	100%	84%	84%	100%	84%	84%
7	01	02	2.01	02	Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 dokumen	100%
7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persentase Urusan pemerintahan yang Di selenggarakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7	01	02	2.02	03	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat diwilayah kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
7	01	02	2.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan	100%	100%	100%	92%	92%	100%	92%	92%
7	01	02	2.02	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	100%	100%	100%	99,99%	99%	100%	99,99%	99,99%
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	100%	99,99%	99%	100%	99,99%	99,99%
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	7 Lembaga	-	7 Lembaga	7 Lembaga	100%	7 Lembaga	7 lembaga	100%
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	3 Laporan	3 laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 laporan	66%
7	01	03	2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (%)	100%	-	-	-	-	100%	-	
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	-	-	-	-	100 Keluarga	-	
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	100 Keluarga	-	-	-	-	100 Keluarga	-	

7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	-	-	-	-	100 Keluarga	-	
	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	-	-	-	-	100 Keluarga	-	
	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	100 Keluarga					100 Keluarga	-	
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase Kasus Kriminalitas di Tingkat kecamatan	1,00%	1,00%	1,00%	0,01%	1%	1,00%	0,01%	1%
7	01	04	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	80%	98,75%	123%	85%	98,75%	98%
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
7	01	04	2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	99,27%	80%	100%	125%	85%	100%	100%

7	01	04	2.03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	12 laporan	-	12 laporan	12 laporan	100 %	12 laporan	12 lap0ran	100%
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Persentase Konflik Sosial Keagamaan di tingkat kecamatan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang di selenggarakan	100%	100%	80%	95,33%	119%	85%	95,33%	95%
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	300 orang	150 orang	300 Orang	300 Orang	100%	300 Orang	300 orang	100%
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, Ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional dan nasional	50 orang	-	50 orang	50 orang	100%	50 orang	50 orang	100%
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, Ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, Ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional dan nasional	50 orang	50 orang	25 orang	25 orang	100%	25 orang	25 orang	50%

7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Persentase Urusan Pemeritahan Desa yang mendukung program pemerintah	70%	100%	50%	99,65%	199%	55%	99,65%	99,%
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang di fasilitasi, direkomendasi, dikoordinasikan	100%	99,84 %	60%	99,65%	166%	70%	99,65%	99%
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	1 Dokume n	-	-	-	1 Dokumen	-	
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokume n	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	1 Dokume n	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7	01	06	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antar desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerja Sama Antar desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1 Dokumen	1 Dokume n	-	-	-	-	-	-
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokume n	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Realisasi dari program /kegiatan ada yang memenuhi target kinerja hasil /keluaran yang direncanakan, ada yang tidak memenuhi target kinerja hasil /keluaran yang direncanakan,.

- a. Adapun faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan terpenuhinya kinerja program/kegiatan antara lain adalah :
 - Masa/waktu Pelaksanaan
 - Kerjasama Pemerintah daerah dengan Pemerintah Kecamatan
 - Kerja Sama dengan Masyarakat
 - Perencanaan yang baik
- b. Adapun faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan tidak terpenuhinya kinerja program/kegiatan antara lain adalah:
 - Kurangnya Pegawai
 - Letak Geografis Kecamatan Buki
 - Pembiayaan
 - Kurangnya Partisipasi Masyarakat karena sibuk mencari nafkah akibat ekonomi yang semakin sulit
 - Perencanaan yang kurang baik

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Buki

Wilayah Kecamatan Buki terdiri dari 7 Desa serta kondisi demografis penduduk yang beraneka ragam sangat dimungkinkan perkembangan pembangunan di Kecamatan Buki lebih cepat di banding kecamatan lainnya sehingga menuntut pihak kecamatan untuk bisa bergerak luwes mengikuti perkembangan keadaan masyarakat baik itu dalam bidang pelayanan, ekonomi maupun sarana dan prasarana yang menunjang dalam kegiatan pendayagunaan aparatur dan masyarakat itu sendiri.

Untuk analisis kinerja pelayanan ini disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel II
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Buki
Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Indikator	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2025 (thn n+2)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Peningkatan Pelayanan di tingkat Kecamatan	25 menit	20 menit	15 menit	10 menit	25 menit		15 menit	10 menit	Target Tercapai
2	Persentase partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pmbangunan	100 %	100 %	100 %	100 %	99,99 %		100 %	100 %	Target Tidak Tercapai
3	Persentase Kasus Kriminalitas di tingkat Kecamatan	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	0,01 %		1,00 %	1,00 %	Melebihi Target
4	Persentase konflik Sosial dan keagamaan di tingkat Kecamatan	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %		0 %	0 %	Target Tercapai
5	Persentase Program Pemerintahan Desa yang mendukung Program Pemerintah	45 %	50%	55 %	60 %	98,65%		60 %	65 %	Melebihi Target

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dengan disusunnya Renja sebagai sebuah rangkaian cara

untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan yang akan ditetapkan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Buki bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1) Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan

SKPD Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Buki untuk cukup baik terlihat dari capaian indikator peningkatan pelayanan ditingkat kecamatan sudah tercapai yaitu 25 Menit untuk tahun 2022.

2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD.

Permasalahan utama yang terdapat dalam pelaksanaan tugas kinerja SKPD adalah kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, serta kurangnya Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan kegiatan yang berhubungan dengan Perencanaan Pembangunan .

3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala Daerah, terhadap capaian pogram nasional / internasional seperti SPM dan MDGs (Development Goals) Pencapaian Program Kerja Kecamatan Buki sebagai penjabaran visi misi kabupaten Kepulauan Selayar.

4) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

- Mewujudkan ketersediaan data / informasi sebagai upaya dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan
- Mensinergikan antara perencanaan dan pelaksanaan agar dapat tercapai target indikator yang telah direncanakan
- Peningkatan pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 sudah termuat program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Kecamatan Buki dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Buki Program dan kegiatan berdasarkan Kecamatan Buki usulan analisis tersebut disampaikan pada rancangan akhir RKPD.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten

Kepulauan Selayar Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Buki Tahun 2024. Program pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang menjadi Program dan Rencana Kerja Kecamatan Buki adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel III
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Kepulauan Selayar

Nama OPD : Kecamatan Buki

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan
Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja Kecamatan Buki %	Kec.Buki	70,53%	1,793,140,715	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja Kecamatan Buki %	Kec.Buki	70,53%	1,793,140,715	
	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Kec. Buki(%)		88%			Persentase Capaian Kinerja Keuangan Kec. Buki(%)		88%		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Buki	100%	14,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Buki	100%	14.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	2,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	2,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	2,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	2,500,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	2,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	2,500,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	3,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	2,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	2,000,000	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, LPPD dan LKPJ.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 laporan	2,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, LPPD dan LKPJ.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 laporan	2,000,000	
Administarsi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Kec. Buki		85%	1,409,080,000	Administarsi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Kec. Buki		85%	1,409,080,000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		17 Orang/ Bulan	1,405,580,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		17 Orang/ Bulan	1,405,580,000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen	1,500,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen	1,500,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SPKD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		1 Laporan	500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SPKD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		1 Laporan	500,000	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1 Dokumen	500,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1 Dokumen	500,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan/Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		4 Laporan	1,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan/Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		4 Laporan	1,000,000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	5.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	5.000.000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD		1 Dokumen	1.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD		1 Dokumen	1.000.000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD		1 Laporan	4.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD		1 Laporan	4.000.000	

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Kec. Buki		85%	5.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Kec. Buki		85%	5.000.000	
Monitoring Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Dokumen	5.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Kec.Buki		85%	82,060,715	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Kec.Buki		85%	82,060,715	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan		1 paket	7,700,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan		1 paket	7,700,000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan		2 Paket	4,860,715	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan		2 Paket	4,860,715	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan		4 Dokumen	4,500,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan		4 Dokumen	4,500,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		400 laporan	65,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		400 laporan	65,000,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah		100%	43.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kersediaan barang Milik Daerah		100%	43.000.000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 Unit	25,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 unit	25,000,000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		5 Unit	3,000,000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		5 Unit	5.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan		2 Unit	15,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan		2 Unit	3.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran		100%	178,500,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran		100%	178,500,000	
Penyedia Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat		12 laporan	2,500,000	Penyedia Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat		12 laporan	2,500,000	

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Yang Disediakan		12 laporan	8,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Yang Disediakan		12 laporan	8,000,000	
Penyedia jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan		12 laporan	168,000,000	Penyedia jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan		12 laporan	168,000,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100%	56,500,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100%	56,500,000	
Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan pajak dan Perizinannya		8 Unit	51,000,000	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan pajak dan Perizinannya		8 Unit	51,000,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara		5 Unit	5,500,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara		5 Unit	5,500,000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan		15 Menit	27,844,348	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan		15 Menit	27,844,348	Prioritas
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang dikoordinasikan		100%	10,000,000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang dikoordinasikan		100%	10,000,000	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		1 laporan	5,000,000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		1 laporan	5,000,000	
Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1 Dokumen	5,000,000	Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1 Dokumen	5,000,000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Urusan pemerintahan yang Di selenggarakan		100%	7,044,348	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Urusan pemerintahan yang Di selenggarakan		100%	7,044,348	

Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah kecamatan		1 laporan	7,044,348	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah kecamatan		1 laporan	7,044,348	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan		100%	10,800,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan		100%	10,800,000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		1 Dokumen	4,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		1 Dokumen	4,000,000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan		1 laporan	1,800,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan		1 laporan	1,800,000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah laporan Kewenangan lain yang dilimpahkan		1 laporan	5,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah laporan Kewenangan lain yang dilimpahkan		1 laporan	5,000,000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keterpenuhan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan		100%	52,536,506	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keterpenuhan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan		100%	52,536,506	Prioritas
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa		100%	32,536,506	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa		100%	32,536,506	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah		7 Lembaga	2,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah		7 Lembaga	2,000,000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan		1 Laporan	30,536,506	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan		1 Laporan	30,536,506	
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (%)		100%	20,000,000	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (%)		100%	20,000,000	

Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		100 keluarga	4,000,000	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		100 keluarga	4,000,000	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri		100 keluarga	4,000,000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri		100 keluarga	4,000,000	
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		100 keluarga	4,000,000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		100 keluarga	4,000,000	
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		100 keluarga	4,000,000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		100 keluarga	4,000,000	
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		100 keluarga	4,000,000	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		100 keluarga	4,000,000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus Kriminalitas di Tingkat kecamatan		1%	28,054,494	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus Kriminalitas di Tingkat kecamatan		1%	28,054,494	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penerapan dan Penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		90%	12,054,494	Koordinasi Penerapan dan Penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		90%	12,054,494	

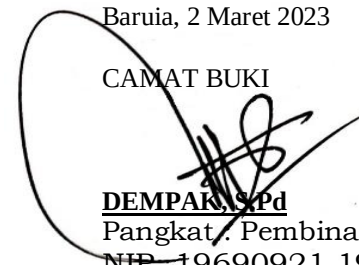
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		12 laporan	12,054,494	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		12 laporan	12,054,494	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		90%	16,000,000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		90%	16,000,000	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan		12 laporan	10,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan		12 laporan	10,000,000	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		12 laporan	6,000,000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		12 laporan	6,000,000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik Sosial Keagamaan di tingkat kecamatan		0%	52,536,506	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik Sosial Keagamaan di tingkat kecamatan		0%	52,536,506	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang di selenggarakan		90%	52,536,506	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang di selenggarakan		90%	52,536,506	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI		150 orang	42,536,506	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI		150 orang	42,536,506	
Pembinaan Kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, Ras, dan golongan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan antar suku dan intra suku, umat		75 Orang	7,000,000	Pembinaan Kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, Ras, dan golongan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan antar suku dan		75 Orang	7,000,000	

lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	beragama, Ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional				lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	intra suku, umat beragama, Ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional				
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		1 laporan	3,000,000	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		1 laporan	3,000,000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Urusan Pemeritahan Desa yang mendukung program pemerintah		60%	31,521,903	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Urusan Pemeritahan Desa yang mendukung program pemerintah		60%	31,521,903	
Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang di fasilitasi, direkomendasi, dikoordinasikan		80%	31,521,903	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang di fasilitasi, direkomendasi, dikoordinasikan		80%	31,521,903	
Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah yang doifasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		1 dokumen	2,500,000	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah yang doifasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		1 dokumen	2,500,000	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Kepala Desa dan Perangkat Desa		1 dokumen	2,500,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Kepala Desa dan Perangkat Desa		1 dokumen	2,500,000	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		1 dokumen	3,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		1 dokumen	3,000,000	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas , fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		1 dokumen	3,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas , fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		1 dokumen	3,000,000	
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		1 dokumen	11,521,903	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		1 dokumen	11,521,903	
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga		1 dokumen	3,000,000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga		1 dokumen	3,000,000	

Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		1 laporan	3,000,000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		1 laporan	3,000,000	
Koordinasi pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		1 laporan	3,000,000	Koordinasi pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		1 laporan	3,000,000	
Jumlah				1,985,634,472	Jumlah				1,985,634,472	

Baruia, 2 Maret 2023

CAMAT BUKI



DEMPAK, S.Pd

Pangkat: Pembina

NIP. 19690921 199203 1 010

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Buki sebagai unsur penunjang pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, terdapat dalam rekapitulasi hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Buki tahun 2024. Berikut ini akan disajikan pada tabel 2.5

Tabel. 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Kepulauan Selayar

Nama PD : Kec. Buki

Kegiatan Prioritas		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran\ Volume		Catatan
No	1	3		4		7
1	Pemeliharaan Jalan Ruas Kadempak-Muntea (Hotmix)	Dusun Kadempak	Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara	3,000,000,000	± 3 Km	
2	Pemeliharaan Jalan Ruas Muntea - Tanabau Timur (Hotmix)	Dusun Muntea	Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara	2,000,000,000	± 2 Km	
3	Pemeliharaan Jalan Rusak Kadempak - Polebunging Timur	Dusun Kadempak	Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara	400,000,000	± 400 Meter	
4	Perbaikan Jalan Ruas Silolo (Desa Lalang Bata) - Tulang (Desa Barugaiya)	Desa Lalangbata	Jumlah Panjang Jalan yang diperbaiki	5,000,000,000	8 Km	
5	Peningkatan Jalan Lingkar Tinggimae - Maharaiya	Dusun Tinggimae- Embaiya- Maharaiya	Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara	750,000,000	1.200 M	

6	Peningkatan Jalan (Hotmix)	Antara DesaBuki Timur dan Desa Bonea Makmur	Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara	500,000,000	2 Km	
7	Peningkatan Jalan Setapak sepanjang Pekuburan	Dusun Saburangia	Jumlah Panjang setapak yang dipelihara	150,000,000	± 200 Meter	
8	Peningkatan Pemeliharaan Jalan Wisata (Batu Lohe)	Desa Balang Butung	Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara	5,000,000,000	3,2 Km	
9	Peningkatan Jalan Tani	Dusun Bahorea	Jumlah Panjang Jalan tani yang dipelihara	350,000,000	2,5 Km	
10	Peningkatan Jalan Tani	Dusun Ampangan	Jumlah Panjang Jalan tani yang dipelihara	200,000,000	2,3 Km	
11	Pembangunan Jalan Lingkar Dusun	Dusun Balang - Butung	Jumlah Panjang Jalan lingkar dusun yang dibangun	350,000,000	1,8 Km	
12	Tanggul Pengaman Jalan	Bajek	Jumlah Panjang Tanggul pengaman Jalan yang dibangun	250,000,000	100 M	
13	Pembangunan Drainase	Dusun Bahorea	Jumlah Panjang Drainase yang dibangun	125,000,000	150 M	
14	Peningkatan Drainase	Dusun Alasa	Jumlah Panjang Drainase yang dibangun	100,000,000	± 200 Meter	
15	Penambahan Panjang Drainase	Dusun Alasa	Jumlah Panjang Drainase yang dibangun	30,000,000	± 30 Meter	
16	Peningkatan Tambatan Perahu	Dusun Saburangia	Jumlah Panjang tambatan Perahu yang dibangun	450.000.000	<u>250 M</u>	
17	Tanggul Penahan Ombak dan Pemecah Ombak	Dusun Tinggimae-Maharaiya	Jumlah Panjang Tanggul Penahan Ombak dan Pemecah Ombak yang dibangun	2,750,000,000	600 M	

18	Pemeliharaan Jalan Lebo- Buhung Bakka	Dusun Lebo	Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara	500,000,000	+ 500 Meter	
19	Perluasan Jembatan Tanggiling	Dusun Karebosi	Jumlah Volume Jembatan yang diperluas	200,000,000	+ 350 Meter	
20	Pemeliharaan Jalan Tanabau Timur - Muntea	Dusun Tanabau Timur	Jumlah Panjang Jalan yang dipeliharah	500,000,000	± 1 Km	
21	Rehab Jembatan	Dusun Nangkala	Jumlah Jembatan yang direhab	200,000,000	1 Unit	
22	Pembangunan Jembatan Penyeberangan Sungai Sepe	Dusun Selamalaju	Jumlah Jembatan yang dibangun	350,000,000	1 Unit	
23	Pemeliharaan Jalan Lingkar Ibukota Desa	Dusun Tenro	Jumlah Panjang Jalan yang dipeliharah	500,000,000	± 1,2 Km	
24	Perbaikan jalan Silolo - Tanete pale	Dusun Silolo - Tanete Pale	Jumlah Panjang Jalan yang diperbaiki	450,000,000	± 2 Km	
25	Peningkatan Jalan Tani Gassa-Pakbatteang (lanjutan)	Dusun Bontosaile	Jumlah Panjang Jalan tani yang dipeliharah	400.000.000	400 M	
26	Pemeliharaan Jalan Tani Alasa-Liku Banri	Dusun Alasa	Jumlah Panjang Jalan tani yang dipeliharah	350.000.000	300 M	
27	Pemeliharaan Jalan Lingkar Ibu Kota Desa (lanjutan)	Desa Buki Timur	Jumlah Panjang Jalan lingkar ibu kota desa yang dipeliharah	300.000.000	300 M	
28	Sarana Prasarana Air Bersih	Desa Buki	Jumlah sarana prasarana Air Bersih yang disediakan	500,000,000	5 Unit	
29	Pembangunan Kawasan Wisata Terpadu	Dusun Tenro Selatan	Jumlah Kawasan Wisata yang dibangun	2,500,000,000	2 Paket	

30	Pembangunan Gapura Destinasi Desa Wisata Cagar Budaya	Baruia	Jumlah Gapura yang dibangun	250,000,000	1 Unit	
31	Rehab Lantai Lapangan Serbaguna Dellempangan	Dusun Tenro Selatan	Jumlah luas lantai lapangan yang direhab	185,000,000	24 x 16 M	
32	Pembangunan Pagar TPU	Desa MekarIndah	Jumlah Panjang Pagar yang dibangun	160,000,000	40 x 100 M	
33	Pembangunan Tower Jaringan	Tenro	Jumlah Tower Jaringan yang dibangun	65,000,000	1 Paket	
34	Pembangunan Tower Jaringan	Dusun Bontobuki	Jumlah Tower Jaringan yang dibangun	250,000,000	1 Unit	
35	Bantuan pengadaan tempat sampah	Bantuan pengadaan tempat sampah	Jumlah Tempat sampah yang disediakan	100,000,000	300 Buah	
36	Bantuan Mesin Pemecah Kenari	Bantuan Mesin Pemecah Kenari	Jumlah Mesin Pemecah Kenari yang disediakan	10,000,000	20 Unit	

Baruia, 2 Maret 2022

CAMAT BUKI



DEMPAK, S. Pd

Pangkat : Pembina

NIP. 19670312 199203 1 004

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Prioritas pembangunan tersebut selain didasarkan pada persoalan eksisting di Kabupaten Kepulauan Selayar, juga dirancang untuk mendukung Prioritas Pembangunan Nasional serta Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan. Sinergitas dan sinkronisasi prioritas pembangunan ini ditunjukkan pada Tabel berikut

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS SULSEL	PRIORITAS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.	Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Pembangunan infrastruktur pendukung program strategis dan prioritas pada sub kawasan/sub sentra
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar		
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Peningkatan investasi sektor unggulan daerah Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam bernilai ekonomi berbasis potensi desa
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata;	Peningkatan derajat hidup manusia yang berkarakter, berbudaya dan bermartabat
Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing		
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencan

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Buki

Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Selayar maka tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Buki adalah :

- Meningkatkan kualitas sistem perencanaan di SKPD agar penyusunan dokumen perencanaan dapat tepat waktu sehingga penyediaan data dan informasi dalam penyusunan perencanaan dapat memadai dan berkualitas sehingga dapat mendukung kelancaran perencanaan di tingkat Kabupaten;
- Meningkatkan kerjasama antar bagian di Kecamatan Buki dalam hal pembuatan perencanaan sehingga terciptanya suasana kerja yang sinergis dan harmonis untuk menciptakan suatu bentuk perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan dan keberadaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah di tentukan.
- Meningkatkan Pelayanan dengan mengefesienkan dan mengefektifkan waktu dalam memberikan pelayanan.

3.3 Program dan Kegiatan

Program Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran yang ditetapkan di tingkat satuan kerja dalam menunjang pencapaian sasaran di tingkat Kabupaten demi terwujudnya visi misi Kabupaten Kepulauan Selayar serta dampaknya terhadap capaian program nasional / internasional seperti SPM dan MDGs (Development Goals) .

Secara garis besar, uraian program/kegiatan ditunjukkan pada tabel rencana program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel T.C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Kepulauan Selayar

SKPD : Kecamatan Buki

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7 01 01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja Kecamatan Buki %	Kec. Buki	70,53%	1,793,140,715			70,53%	1,793,140,715
						Persentase Capaian Kinerja Keuangan Kec. Buki(%)		88%				88%	
7	01	01	2.01		Perencanaan , Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Perencanaan , Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Buki	100%	14,000,000	3		100%	14,000,000
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	2,000,000	3		1 Dokumen	2,000,000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	2,500,000	3		1 Dokumen	2,500,000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	2,500,000	3		1 Dokumen	2,500,000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	3,000,000	3		1 Dokumen	3,000,000

7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	2,000,000	3		1 Dokumen	2,000,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP) dan LKPJ.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 Dokumen	2,000,000	3		2 Dokumen	2,000,000
7	01	01	2.02		Administarsi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	1,409,080,000	3		100%	1,409,080,000
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		12 Bulan	1,405,580,000	3		12 Bulan	1,405,580,000
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen	1,500,000	3		1 Dokumen	1,500,000
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Dokumen	500,000	3		1 Dokumen	500,000
7	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1 Dokumen	500,000	3			500,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		4 Dokumen	1,000,000	3		4 Dokumen	1,000,000
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec.Buki	100%	5,000,000	3		100%	4,000,000
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Mlik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik DaerahSKPD		1 Dokumen	1,000,000	3		1 Dokumen	1,000,000

7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	4,000,000	3		1 Laporan	3,000,000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec.Buki	100%	5,000,000	3		100%	2,500,000
7	01	01	2.05	05	Monitoring Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Dokumen	5,000,000	3		1 Dokumen	2,500,000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec.Buki	100%	82,060,715	3		100%	82,060,715
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan		5 Paket	7,700,000	3		5 Paket	7,700,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	4,860,715	3		2 Paket	4,860,715
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		4 Dokumen	4,500,000	3		4 Dokumen	4,500,000
7	01	01	2.03	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		400 laporan	65,000,000	3		400 laporan	65,000,000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Keterpenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec.Buki	100%	43,000,000	3		100%	43,000,000
	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 Unit	25,000,000	3		1 Unit	25,000,000
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan		2 paket	3,000,000	3		2 paket	3,000,000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2 Unit	15,000,000	3		2 Unit	15,000,000

7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Buki	100%	178,500,000	3		100%	178,500,000
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 laporan	2,500,000	3		12 laporan	2,500,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	8,000,000	3		12 laporan	8,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyedia jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan	168,000,000	3		12 laporan	168,000,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Buki	100%	56,500,000	3		100%	56,500,000
7	01	01	2.09	02	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		9 Unit	51,000,000	3		9 Unit	51,000,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5 Unit	5,500,000	3		5 Unit	5,500,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan		15 menit	27,844,348	3	Prioritas	15 menit	27,844,348
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan (%)	Kec.Buki	100%	10,000,000	3		100%	10,000,000
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		1 laporan	5,000,000	3		1 laporan	5,000,000
7	01	02	2.01	02	Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1 dokumen	5,000,000	3		1 dokumen	5,000,000

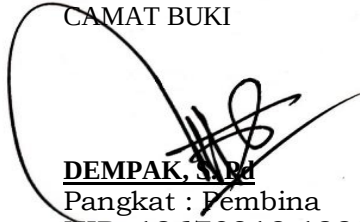
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Urusan pemerintahan yang diselenggarakan (%)	Kec.Buki	100%	7,044,348	3		100%	7,044,348
7	01	02	2.02	03	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 laporan	7,044,348	3		1 laporan	7,044,348
7	01	02	2.02		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan (%)	Kec.Buki	100%	10,800,000	3		100%	10,800,000
7	01	02	2.02	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Perizinan Non Usaha yang Dilaksanakan		1 dokumen	4,000,000	3		1 dokumen	4,000,000
7	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan		1 laporan	1,800,000	3		1 laporan	1,800,000
7	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Urusan Pemeriksaan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		1 laporan	5,000,000	3		1 laporan	5,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (%)		100%	52,536,506	3	Prioritas	100%	52,536,506
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa (%)	Kec.Buki	100%	32,536,506	3		100%	32,536,506
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		7 lembaga	2,000,000	3		7 lembaga	2,000,000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 laporan	30,536,506	3		1 laporan	30,536,506
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (%)		100%	20,000,000	3		100%	20,000,000

7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		100 keluarga	4,000,000	3		100 keluarga	4,000,000
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri		100 keluarga	4,000,000	3		100 keluarga	4,000,000
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		100 keluarga	4,000,000	3		100 keluarga	4,000,000
	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		100 keluarga	4,000,000			100 keluarga	4,000,000
	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		100 keluarga	4,000,000			100 keluarga	4,000,000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan (%)		1%	28,054,494	3	Prioritas	1%	28,054,494
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (%)		90%	12,054,494	3		90%	12,054,494
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		12 laporan	12,054,494	3		12 laporan	12,054,494
7	01	04	2.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)		90%	16,000,000	3		90%	16,000,000
7	01	04	2.03	01	Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	jumlah Laporan Hasil Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		12 laporan	10,000,000	3		12 laporan	10,000,000

7	01	04	2.03	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	6,000,000	3		12 laporan	6,000,000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan (%)	0%	52,536,506	3		0%	52,536,506
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang di selenggarakan (%)	90%	52,536,506	3		90%	52,536,506
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300 orang	42,536,506	3		300 orang	42,536,506
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, Ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 orang	7,000,000	3		50 orang	8,000,000
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 laporan	3,000,000	3		1 laporan	2,000,000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah (%)	60%	31,521,903	3		60%	31,521,903
7	01	06	2.01		Persentase pembinaan dan Pengawasan yagn difasiitasi, direkomendasi, dikoordinasikan (%)	Persentase Keterpenuhan Fasilitas, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80%	31,521,903	3		80%	31,521,903
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 dokumen	2,500,000	3		1 dokumen	2,500,000
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 dokumen	2,500,000	3		1 dokumen	2,500,000

7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen	3,000,000	3		1 dokumen	3,000,000
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas , fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 dokumen	3,000,000	3		1 dokumen	3,000,000
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 dokumen	11,521,903	3		1 dokumen	11,521,903
7	01	06	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1 dokumen	3,000,000	3		1 dokumen	3,000,000
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 laporan	3,000,000	3		1 laporan	3,000,000
7	01	06	2.01	18	Koordinasi pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1 laporan	3,000,000	3		1 laporan	3,000,000
JUMLAH								1,985,634,472				1,985,634,472

Baruia, 2 Maret 2022
CAMAT BUKI


DEMPAK, S.P.
Pangkat : Pembina
NIP. 19670312 199203 1 004

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Buki terdiri dari Rencana Program, Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2024.

Untuk lebih jelasnya, Rencana Kerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif diuraikan dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Rencana Kerja Kecamatan Buki Tahun 2024

Kode					Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja Kecamatan Buki %	70,53%	1,793,140,715
						Persentase Capaian Kinerja Keuangan Kec. Buki(%)	88%	
7	01	01	2.01		Perencanaan , Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Perencanaan , Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	14,000,000
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2,000,000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2,500,000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2,500,000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3,000,000
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2,000,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP) dan LKPJ.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	2,000,000
7	01	01	2.02		Administarsi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1,409,080,000
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	1,405,580,000
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1,500,000
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	500,000
7	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	500,000

7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Dokumen	1,000,000
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	5,000,000
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1,000,000
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4,000,000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	5,000,000
7	01	01	2.05	05	Monitoring Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	5,000,000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	82,060,715
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan	5 Paket	7,700,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4,860,715
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4,500,000
7	01	01	2.03	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 laporan	65,000,000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Keterpenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	43,000,000
	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	25,000,000
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan	2 paket	3,000,000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	15,000,000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	178,500,000
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	2,500,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	8,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyedia jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	168,000,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	56,500,000
7	01	01	2.09	02	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	51,000,000

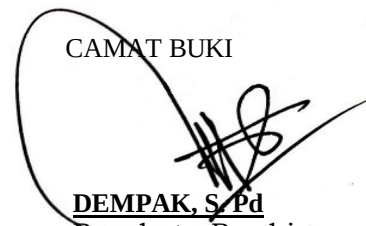
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5,500,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	15 menit	27,844,348
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan (%)	100%	10,000,000
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	5,000,000
7	01	02	2.01	02	Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	5,000,000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Urusan pemerintahan yang diselenggarakan (%)	100%	7,044,348
7	01	02	2.02	03	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	7,044,348
7	01	02	2.02		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan (%)	100%	10,800,000
7	01	02	2.02	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Perizinan Non Usaha yang Dilaksanakan	1 dokumen	4,000,000
7	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 laporan	1,800,000
7	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Urusan Pemeriksaan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 laporan	5,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (%)	100%	52,536,506
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa (%)	100%	32,536,506
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 lembaga	2,000,000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	30,536,506
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (%)	100%	20,000,000
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 keluarga	4,000,000
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	100 keluarga	4,000,000

7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 keluarga	4,000,000
	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 keluarga	4,000,000
	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	100 keluarga	4,000,000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan (%)	1%	28,054,494
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (%)	90%	12,054,494
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	12,054,494
7	01	04	2.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	90%	16,000,000
7	01	04	2.03	01	Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	10,000,000
7	01	04	2.03	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	6,000,000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan (%)	0%	52,536,506
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang di selenggarakan (%)	90%	52,536,506
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	42,536,506
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, Ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	orang	7,000,000
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 laporan	3,000,000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah (%)	60%	31,521,903

7	01	06	2.01		Persentase pembinaan dan Pengawasan yang difasilitasi, direkomendasi, dikoordinasikan (%)	Persentase Keterpenuhan Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80%	31,521,903
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 dokumen	2,500,000
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 dokumen	2,500,000
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen	3,000,000
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 dokumen	3,000,000
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 dokumen	11,521,903
7	01	06	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1 dokumen	3,000,000
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 laporan	3,000,000
7	01	06	2.01	18	Koordinasi pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1 laporan	3,000,000
JUMLAH								1,985,634,472

Baruia, 2 Maret 2022

CAMAT BUKI



DEMPAK, S. Pd

Pangkat : Pembina

NIP. 19670312 199203 1 004

BAB V

Penutup

Rencana Kerja Kecamatan Buki Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Buki Tahun 2021-2026, yang memuat antara lain evaluasi atas pelaksanaan rencana kerja, telaahan terhadap kebijakan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Buki, tujuan dan sasaran renja Kecamatan, serta program dan kegiatan.

Rencana Kerja Kecamatan Buki Tahun 2024 akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Buki Tahun 2024 dengan mempertimbangkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024.

Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap unit kerja dalam lingkup Kecamatan Buki wajib melakukan pengendalian dan evaluasi atas hasil pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Buki ini. Hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan rencana kerja Kecamatan Buki Tahun 2024.

Baruia, 2 Maret 2023

CAMAT BUKI,



DEMPAK, S. Pd

Pangkat : Pembina

NIP. 19670312 199203 1 004

